1-31-2008

Perspektif Transaksi E-Commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia

Rizal Alif

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>

Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Alif, Rizal (2008) "Perspektif Transaksi E-Commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 5 : No. 2 , Article 8.

DOI: 10.17304/ijil.vol5.2.173

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol5/iss2/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Perspektif Transaksi *E-commerce* di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia

Rizal Alif*

In the era of business globalization, market depends heavily on the Information Technology (IT) especially the internet which gives benefits of time efficiency to entrepreneurs. In Indonesia, however, there is no legal certainty in this matter due to pending bills in the legislative body (DPR). Further, there are many more problems related to e-commerce transactions which frequently crossing the state-borders, such as jurisdiction, choice of law and forum, validity of treaty and legal protection to the trader. This article tries to discuss and analyze those problems from the Indonesian law on agreement in order to anticipate the global business transactions through e-commerce.

A. Latar Belakang.

Di era globalisasi bisnis perdagangan bebas sekarang ini (WTO/AFTA/APEC), praktik bisnis sangat tergantung kepada IT (*Information Technology*), khususnya Internet. Perdagangan dengan menggunakan sarana internet, tentunya sangat memberikan kemudahan dan efisiensi yang sangat tinggi bagi mereka yang memerlukan produk yang sifatnya sederhana maupun tergolong yang memerlukan sarana *delivery* antar negara.

Sebagai contoh, transaksi bisnis melalui internet *www.Amazon.com*, sebuah toko maya di AS yang mampu menyajikan lebih dari 2,5 juta buku kepada para pengunjung *website*-nya. Bandingkan dengan sebuah toko buku tradisional terbesar di AS yang hanya mampu menyediakan sekitar 150.000 buku saja¹.

* Magister hukum bisnis/Peneliti dan Penulis/Counsellor at business Law

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, April 2003, hal 115.

Oleh karena itu, suka tidak suka siap tidak siap, kita sekarang sedang berada pada milinium ke III, yang ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan kepada kita media dunia maya (*cyberspace*), internet, yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paparless document*). Sekarang ini jumlah pengguna internet di dunia semakin banyak saja. Di AS mencapai 110 juta pada akhir 1999. Di Eropa pengguna internet pada tahun 2000 mencapai 135 juta. Sedangkan, di Asia Pasifik mencapai 72 juta².

Perkiraan pendapatan kontrak dagang elektronik (*e-commerce*) amat bervariasi. *Forrester Reserach* memproyeksikan bahwa hingga 2003 pendapatan *bisnis to bisnis* (B to B) di AS akan mencapai \$ 1.000.000.000.000,00 (satu triliun dolar). Sementara *Boston Consulting Group* dan *Shop orgset* memperkirakan pada angka \$ 2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar dolar). Pendapatan bisnis ke konsumen (B to C) menurut *UDC Corp* akan melampaui \$ 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima dolar) pada tahun 2003².

Manfaat kontrak dagang elektronik ini dapat menekan biaya barang dan jasa juga dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang menyangkut kecepatan untuk segera mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Menhub dan Telekomunikasi pada 3 Oktober 2000 telah mengemukakan :

“.....perubahan lingkungan ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berlangsung sangat dinamis telah mendorong lahirnya lingkungan telekomunikasi yang jauh berbeda dengan keadaan yang telah berlaku begitu lama sebelumnya. Perubahan mendasar ini menimbulkan realita baru pada penyelenggaraan

² Mariam Darus Badrul Zaman, Sutan Remi Syahdeni, Geru Supratomo, Faturachman Djamila Dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 269

telekomunikasi diseluruh dunia dalam garis besar, wujud perubahan dan realita baru antara lain berupa:

- a. Beralihnya fungsi telekomunikasi dan utilitas menjadi komoditi perdagangan.
- b. Diakuihnya secara umum bahwa di era informasi teknologi, informasi berperan sebagai salah satu sektor penting sebagai penunjang dan meningkatkan daya saing suatu bangsa.

Dengan demikian, peran teknologi informasi berpotensi untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, sayangnya belum ada kepastian hukum karena sampai sekarang RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan RUU tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik belum disahkan DPR. Sementara pelanggaran hukum transaksi *bisnis e-commerce (cyberlaw)* di Indonesia oleh para *hacker/cracker* “nakal” semakin bertambah banyak sehingga implikasinya dapat menyebabkan negara kita dikucilkan dari pergaulan masyarakat bisnis internasional. Dan ujung-ujungnya semakin bertambah sulit bangsa ini untuk segera bangkit dari keterpurukan ekonominya akibat dihantam “badai” krismon pada Juli tahun 1997 yang belum juga “berlalu” seperti negara tetangga kita, Malaysia, dan Thailand dan Korsel yang sudah “siap” menghadapi era persaingan bisnis global (*e-commerce*) tersebut.

Transaksi bisnis melalui media internet – *e-commerce* ini di dalam sistem hukum kita, termasuk dalam bidang hukum perdata, sebagai subsistem dari hukum Perjanjian Buku III BW. *E-commerce* ini juga memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian antara lain asas kebebasan berkontrak, asas “*pacta sunt servanda*”, asas itikad baik, asas kepatutan, asas konsensualisme, asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat, asas moral, dan asas internasional.

Sehubungan dengan transaksi *e-commerce*-dunia maya tersebut, permasalahan yang timbul bahwa transaksi bisnis *e-commerce* tersebut tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi aktivitas transaksi bisnisnya sudah berjalan tanpa batas (*borderless state*) sehingga memunculkan masalah yurisdiksi, *choice of law* dan

forum, keabsahan/kekuatan pembuktiannya, perlindungan hukum terhadap para pihak yang bertransaksi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hukum perjanjian harus dapat menjamin bahwa setiap kontrak yang dibuat para pihak melalui media elektronik/TI harus diakui keabsahannya dengan kontrak yang dibuat dalam dunia nyata.

Berdasarkan fenomena dan paradigma baru transaksi bisnis di era globalisasi bisnis melalui media internet/*e-commerce*, yang berasal dari negara Amerika Serikat, Anglo-saxon dan sedang berkembang di dalam dunia transaksi bisnis sekarang ini di Indonesia, maka Penulis akan mencoba membahas dan menganalisisnya dari aspek hukum perjanjian Indonesia dalam mengantisipasi maraknya transaksi bisnis globalisasi (WTO/AFTA/APEC) melalui *e-commerce*.

B. Pengertian E-Commerce

E-Commerce adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang dan jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan melalui media elektronik (digital medium) tanpa kehadiran secara fisik dari para pihak. Media ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau *World Wide Web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional³.

Jadi ada 6 komponen dalam kontrak dagang elektronik, yaitu: ada kontrak dagang; kontrak itu dilaksanakan dengan elektronik; kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan; kontrak itu terjadi dalam jaringan publik; sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau *www* dan kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.

C. Bentuk Perjanjian E-Commerce

Bentuk suatu perjanjian adalah bebas dapat berbentuk tertulis atau tidak. Dengan bentuk tertulis pembuktiannya lebih mudah dari pada yang tidak tertulis. Dengan asas bentuk bebas ini, maka dapat diterima oleh hukum perjanjian kita, bentuk elektronik, internet, e-mail, fax, dan lain-lain.

³ Mariam Darus Badruzaman cs, *Ibid.*, hal 283.

Lazimnya format kontrak yang dipergunakan di lingkungan masyarakat elektronik adalah kontrak baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*. Di Belanda standar kontrak baku diatur. Di Indonesia hal itu belum diatur dalam BW-nya.

Para Pihak di dalam kontrak dagang elektronik adalah :

- a. penyedia jasa internet (*internet service provider*)
- b. pengembang (*intellectual agent*).

Adapun ciri-ciri dari *E-Commerce* meliputi, cara berkomunikasi, garansi *vrijwaring*, biaya, pembayaran, kerahasiaan, dan kaitan dengan hak milik intelektual, pengumuman, dan perjanjian campuran (*contractus sui generis*).

Alat Bukti Transaksi Bisnis *E Commerce*.

Adapun alat-alat buktinya dapat mengacu kepada pasal 1865 BW: bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dimuka hakim. Sementara untuk persyaratan legalitas transaksi *e-commerce* tersebut mengacu pada Pasal 1320 BW: Kesepakatan para pihak; Kecakapan untuk membuat perjanjian; suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

D. Jenis-jenis hubungan hukum dalam *E- Commerce*.

Jenis-jenis hubungan dalam *e-commerce* adalah sebagai berikut⁴:

1. *Business to Business (B to B)*

Transaksi B to B adalah transaksi antarperusahaan (baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya diantara mereka sudah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama.

2. *Business to Customer (B to C)*

B to C adalah transaksi antarperusahaan dengan konsumen/individu, contohnya adalah *amazon.com*. Pada jenis ini, transaksi disebarkan secara umum dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi.

3. *Customer to customer*

⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi hukum telematika*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, September 2003, hal 227.

Customer to customer adalah transaksi dimana individu saling menjual barang pada satu sama lain, contohnya adalah *e-bay*.

4. *Customer to business*

Customer to business adalah transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan, contohnya adalah *priceline.com*.

5. *Customer to government*.

Customer to government adalah transaksi di mana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak.

F. E-Commerce Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia

E-Commerce terletak dalam bidang hukum perdata, sebagai subsistem dari hukum perjanjian. *e-commerce* ini memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian, antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, asas itikad baik, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas ganti rugi, asas kekuatan mengikat, asas moral, dan asas internasional.

Di dalam Buku III KUH Perdata atau BW, ditemukan pengaturan perjanjian bernama dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII. *E-commerce* yang berkembang diluar KUH Perdata, berdasarkan doktrin termasuk dalam kategori yang dinamakan kontrak tidak bernama. Terhadapnya diterapkan ajaran umum (Bab I sampai dengan Bab V KUH Perdata)⁵.

1. Definisi Perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata)

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih."

Perjanjian yang dimaksud oleh pasal 1313 KUH Perdata tersebut adalah perjanjian *obligatoir* atau perjanjian timbal balik dimana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak. Selain itu, pada praktiknya masyarakat akan

⁵ Mariam Darus Cs, *Op. Cit*, hal. 295.

menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah harus tertulis (*writing*) dan bertandatangan (*signed*) di atas materai (*duty stamp*) ataupun kertas segel serta harus asli (*original*).

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan yang lahir dengan sendirinya, tetapi hubungan itu tercipta karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.

Dalam buku "Hukum Perjanjian", Subekti mencoba memberikan definisi perikatan, sebagai berikut:

"Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".

Dari pengertian perikatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian adalah peristiwa hukum; sedangkan perikatan adalah hubungan hukumnya, atau dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Hal ini karena perjanjian berisi ketentuan-ketentuan yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak sehingga perjanjian yang sah berlaku sebagaimana layaknya undang-undang (Pasal 1320).

2. Syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata)

Kesepakatan para pihak yang mana hal ini merupakan cermin dari adanya asas *consensus* dari suatu kontrak.

- a. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Tanpa adanya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian/kontrak tersebut dapat dibatalkan (*null and void*).

Asser membedakan bagian perjanjian dengan esenselia, naturalia, dan aksidentalialia. Esenselia adalah sifat yang harus ada dalam perjanjian/kontrak, misalnya persetujuan para pihak dan objek perjanjian. Naturalia merupakan sifat bawaan perjanjian secara diam-diam melekat pada kontrak, misalnya menjamin tidak adanya cacat dalam benda yang dijual. Aksidentalialia, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dimana diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian, misalnya mengenai domisili para pihak.

Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata).

Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.

Isi Perjanjian

Isi perjanjian adalah :

- a. hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.
- b. Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan kebiasaan dan undang-undang (pasal 1339 KUH Perdata).

Hal-hal menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian.

Dalam KUH Perdata, Pasal 1362 BW sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang. Yurisprudensi mengenai ini dikenal dengan nama *Arrest Lindenbaum Cohen* (tahun 1919).

G. Legalitas Transaksi E-Commerce.

Menurut Edmon Makarim, legalitas transaksi *e-commerce* berdasarkan pasal 1320 BW sebagai berikut⁶:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya:

Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi/direspon oleh pihak lain, maka dengan

⁶ Edmon Makarim, *op. cit*, hal---

demikian tidak akan ada kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan.

Dalam transaksi *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website* yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati.

Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka ia hanya perlu memilih barang yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya setelah pesanan tersebut sampai di tempat penjual (*merchant*), maka penjual (*merchant*) akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen.

Proses terciptanya penawaran dan penerimaan menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan. Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya, dengan memberlakukan sistem "3 klik":

Cara kerja sistem ini adalah: Pertama, setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual (klik pertama), maka si calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua). Dan masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga). Sistem tiga klik ini jauh lebih aman dari pada sistem 2 klik yang berlaku sebelumnya. Sebab dalam sistem "2 klik", penjual dapat mengelak dengan menyatakan kepada calon pembeli bahwa ia tidak pernah menerima "penerimaan" dari calon pembeli. Dan ini tentunya akan merugikan pembeli.

Dalam hukum Indonesia belum ada ketentuan semacam ini, tidak ada kewajiban dari penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli sehingga banyak penjual yang tidak melakukan konfirmasi. Hal ini sangat merugikan konsumen/pembeli karena pembeli tidak mengetahui apakah pesannya telah diterima atau belum. Jika terjadi wanprestasi akan sulit menghitung kapan terjadinya wanprestasi karena penjual (*merchant*) dapat

mendalilkan bahwa ia tidak menerima pesanan tersebut. Oleh karena itu, konfirmasi itu sangat penting dilakukan penjual (*merchant*).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pada dasarnya semua orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Sedangkan untuk yang tidak cakap, menurut undang-undang adalah mereka yang belum dewasa (genap berusia 21 tahun) atau mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah dan mereka yang dibawah pengampuan (gila, dungu, mata gelap, lemah akal, dan pemboros).

Dalam transaksi *e-commerce* sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan karena proses penawaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan tetapi hanya melalui media virtual yang rawan penipuan.

Jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan.

c. Suatu hal tertentu.

Hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Ada barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan dalam transaksi *e-commerce*, misalnya memperjualbelikan hewan dan ada juga barang-barang yang tidak dapat dijual melalui kesepakatan *on-line*, seperti jual beli tanah yang mensyaratkan jual beli tanah harus dituangkan dalam akta otentik, akta pejabat pembuat akta tanah.

d. Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal adalah isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut haruslah sesuai

dengan undang-undang dan tidak belawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

e. Saat terjadinya perjanjian jual beli.

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak ketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Kesepakatan dihasilkan dalam transaksi *e-commerce* jika pembeli menyepakati barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual (*merchant*).

f. Batalnya perjanjian.

Transaksi *e-commerce* sebagai suatu perjanjian dapat dibatalkan. Pembeli yang telah menyepakati barang dan harga masih mempunyai kesempatan untuk membatalkan perjanjian jual beli dengan fasilitas *cancel an order*, tetapi dengan catatan bahwa barang belum masuk pada tahap pengiriman.

Demikian pula dengan penjual (*merchant*), mereka juga dapat membatalkan perjanjian jika ternyata yang melakukan transaksi tersebut terbukti belum dewasa atau tidak cakap atau ternyata ada unsur-unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan.

H. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*.

Ingkar janji/wanprestasi adalah wujud dari tidak dipenuhinya perikatan, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; debitur terlambat memenuhi perikatan; dan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan (1244 KUH Perdata). Akibat hukum dari peristiwa ingkar janji/wanprestasi tersebut, maka kepada para pihak yang terikat perjanjian dapat dituntut ganti rugi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum/*on rechtmategedad* (Pasal 1765 KUH Perdata).

Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual (*merchant*) dalam transaksi *e-commerce*, yaitu⁷:

⁷ Edmon Makarim, *Ibid.*, hal —

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Dalam transaksi *e-commerce*, penjual/*merchant* mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi.

Jika penjual tidak melaksanakan kedua kewajibannya tersebut maka penjual dapat dikatakan wanprestasi. Contohnya: toko *online kakilima.com* yang menawarkan *cakes* (kue ulang tahun). Kaki lima menjanjikan untuk mengantarkan pesanan pembeli dalam waktu satu minggu setelah pesanan diterima. Apabila pembeli memesan kue ulang tahun tersebut pada 12 Juli 2001, maka seharusnya *cakes* tersebut sampai ditempat pembeli pada 19 Juli 2001. Tetapi, ternyata penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, ia tidak mengirimkan kue tersebut sehingga dengan demikian penjual telah melakukan wanprestasi. Berbeda dengan *merchant* yang ada diluar negeri, *amazon.com*, yang merinci lamanya pengiriman barang dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, *amazon.com* juga membedakan pesanan yang diantar di daerah AS dan di luar AS.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Contohnya, pembeli memesan satu buah rangkaian bunga pada *kakilima.com*. Pada saat pemesanan tersebut, yang pembeli lihat adalah sebuah gambar di layar monitornya yang menampilkan gambar sebuah rangkaian bunga mawar merah yang segar. Tetapi, ternyata rangkaian bunga yang sampai ketempat bunga yang sudah layu.

c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Jika barang pesanan datang terlambat, tetapi tetap dapat dipergunakan, maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat. Sebaliknya jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi, maka digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, misalnya, pembeli memesan buku dari toko *samur on line*. Pesanan yang seharusnya hanya memerlukan waktu pengiriman 3 hari ternyata baru tiba pada hari ketujuh.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagai contoh adalah penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada khalayak umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.

Akibat dari wanprestasi *e-commerce* tersebut, maka pihak konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada penjual/*merchant*.

Konsep ganti rugi yang terdapat dalam KUH Perdata Indonesia, sebagai berikut :

1. Biaya;
2. Kerugian (dalam arti sempit);
3. Bunga.

Atau dalam literatur dan praktik hukum suatu ganti rugi dapat dibagi dalam: a). Ganti rugi; b) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi; c) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi; dan d) Pembatalan kontrak.

I. Pengaturan Transaksi Bisnis *e-commerce* dan Bentuk Kontrak Menurut Sistem Hukum *Anglo-Saxon/Inggris* sebagai Suatu Studi Banding.

Harus diakui bahwa transaksi *e-commerce* berasal dan berkembang dengan fenomenal dan pesat di AS dan Eropa. Oleh karenanya, pengaturan nasionalnya berasal dari pendekatan *hukum Anglo-Saxon/Common Law*, yang digunakan sehingga upaya adaptasi tidak mengalami banyak kesukaran.

Sebagai bahan perbandingan dalam *common law*, pembentukan perjanjian mengharuskan dipenuhinya 5 (lima) syarat, yaitu⁸:

1. Kesepakatan para pihak untuk mengikatakan diri, mencakup:
 - Adanya suatu penawaran (*offer*) dari pihak *offeror* sebagai pihak pertama;
 - Adanya penyampaian penawaran tersebut kepada *offeree* sebagai pihak kedua;

⁸ Mieke Komar Kantaatmadja, *Pengantar Kontrak Untuk Perdagangan Elektronik (E-Contract)*, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 12 ELIPS II, April 2002, hal. 5.

- Adanya penerimaan penawaran oleh pihak kedua yang menyatakan kehendaknya untuk terikat pada persyaratan dalam penawaran tersebut;
- Adanya penyampaian penerimaan (*acceptance*) oleh pihak kedua kepada pihak pertama.
- 2. *Consideration (something of value)* yang ditukarkan antara para pihak;
- 3. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- 4. Suatu subjek yang halal.

Contoh ilustrasi bagaimana dapat dipastikan bahwa pihak penerima penawaran telah menerima suatu penawaran sebagai berikut:

Si A, membuka website dari sebuah provider dan dia membaca "welcome to XXX.com. We are delighted you have visited our site. By visting here, you have been entered as a subscriber to our newsletter XXXnews, which will be sent to you electronilcally every week at a cost of \$ 5.00 per week. We will send you an invoice every month.You may cancel your subscription at any time....."

"For a subcription click the "OK" button, or For a subscription call 1-8000-345-4444 and give your name and addreses at the time, or send me an email with the words "aaa" to subscribe @XXX.Com"

Pesan di atas jelas berisikan suatu penawaran, yaitu dari pihak XXX.com dengan ketentuan mengenai cara penerimaan, cara pembayaran, dan penghentian kontrak serta kewajiban pihak pertama dan kedua. Persetujuan diterimanya penawaran kontrak akan terjadi apabila A, melaksanakan pesan di atas yaitu menekan "OK". Atau menelepon ke nomor atau mengirim *e-mail* tersebut. Pihak pertama terikat kepada kontrak tersebut, termasuk terikat pada ketentuan tambahan yang terlampir (jika ada), yang harus dibaca Pihak Kedua (A).

Disamping itu, hukum harus dapat menjamin bahwa setiap kontrak yang dibuat para pihak melalui *e-commerce* diakui keabsahannya, setara dengan pengakuan yang diberikan kepada suatu kontrak yang dibuat dalam dunia nyata. Tanpa pengakuan ini, maka tidak akan tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang

bertransaksi melalui internet. Karena, hukum nasional setiap negara, pertama-tama harus menyusun pokok-pokok hukum kontrak untuk bertransaksi di dalam dunia maya.

Oleh karena itu, bisnis *e-commerce* adalah usaha perdagangan yang melewati batas wilayah negara yang sebaiknya diatur secara global disadari oleh mayoritas negara dan pelaku bisnis. Namun, pengaturan global masih jauh dari kenyataan, maka yang perlu diusahakan adalah terciptanya harmonisasi hukum yang luas, yang meliputi pembahasan aturan hukum dan praktik hukum negara asing, *model laws* yang berada di forum asing, organisasi internasional serta analisis seberapa jauh hal-hal tersebut dapat diterima oleh hukum nasional.

Penawaran/*offering* dan penerimaan/*acceptance* di dalam pengaturan transaksi *e-commerce* ini juga dikenal dalam bentuk kontrak menurut hukum Inggris, dimana hampir sepertiga umat manusia di dunia ini diatur hukum yang aslinya, dari negara Inggris-sistem *Anglo-Saxon*, contohnya AS, Malaysia, Singapura, bahkan Belanda yang menganut sistem *Civil Law* juga sudah menyesuaikannya dengan sistem *Anglo-Saxon* selaku salah satu anggota dari Masyarakat Ekonomi Eropa/MEE di dalam menghadapi globalisasi bisnis perdagangan sekarang ini. Salah satu produk hukum Inggris tersebut adalah Bentuk Kontrak Menurut Hukum Inggris atau *Formation Contract In English Law*. Menurut Hukum Inggris, kontrak adalah cabang dari hukum perdata atau lawan dari hukum publik. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya, contohnya A dan B setuju untuk melaksanakan transaksi jual beli sebuah mobil. A sebagai penjual dan B sebagai pembeli. Pada dasarnya konsensus di dalam kontrak mengikat para pihak sebagai hukum itu berarti para pihak dilarang melanggar konsensus tersebut atau tidak diizinkan salah satu pihak membatalkan kontrak itu⁹. Menurut Sir William Anson kontrak adalah¹⁰:

⁹ Rizal Alif, *Bentuk Kontrak Menurut Hukum Inggris*, Majalah Hukum Trisakti, April 1998.

"As a legally binding agreement made between two or more parties, by which rights are acquired by one or more to acts or forbearance on the part of the other or others".

Dengan kata lain, ia mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian di antara 2 (dua) atau lebih para pihak yang bermaksud untuk mempunyai suatu konsekuensi hukum.

Setiap kontrak berdasarkan atas perjanjian para pihak. Namun, tidak setiap perjanjian di antara para pihak disebut kontrak. Sebab, hanya perjanjian yang dapat menunjukkan keinginan para pihak tentang perjanjian seyogyanya memiliki konsekuensi hukum.

Perjanjian keluarga dimana seorang suami setuju untuk membayar istrinya sejumlah uang untuk mengelola rumah tangga bukan suatu kontrak.

Syarat-syarat sahnya kontrak:

1. Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak;
2. Salah satu pihak harus membuat suatu penawaran yang mengikat kepada pihak lain, dan penawaran itu sudah harus diterima;
3. Perjanjian para pihak harus asli;
4. Kontraknya harus didukung dengan pertimbangan;
5. Kontraknya harus dibuat dalam bentuk khusus.

Kontrak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas tidak mengikat secara hukum atau *null and void*..

Bentuk kontrak menurut hukum Inggris- sistem *Anglo-Saxon* harus memperhatikan hal-hal di bawah ini¹¹:

¹⁰ Mrs G. Padfield LLB DPA dan DLA Barker LLB Mphil Dipl G ACIARB FBIM, *Law Made Simple Books*, Heineman Profesional Publishing, OXFORD, England, 1987, hal. 112.

¹¹ Rizal Alif, *Op. Cit*, hal __

III A.1. Penawaran dan Penerimaan (*Offer* dan *Acceptance*).

Semua perjanjian dapat dianalisa ke dalam suatu penawaran atau *Offer* dan Penerimaan atau *Acceptance*, yang dapat dibuat dengan kata-kata atau tingkah laku. Namun, tidak semua penawaran dan penerimaan akan diizinkan ke dalam Perjanjian Hukum. Ada peraturan hukum yang mengatur keabsahaan Penawaran dan Penerimaannya yang harus kita pertimbangkan .

Pertama, **Penawaran**, suatu penawaran dapat dibuat kepada orang yang khusus atau masyarakat umum untuk menerimanya. Namun, penawaran itu harus dikomunikasikan kepada penerima sebagai suatu fakta pertanyaan. Di dalam hal pembatalan, suatu penawaran, tanpa disertai materai dan pertimbangan diasumsikan dibuka waktu yang beralasan kecuali hal itu tidak diekspresikan untuk membuka suatu penawaran dalam jangka waktu yang terbatas.

Selanjutnya, kecuali suatu perjanjian tambahan yang bertentangan dengan yang telah dibuat, ini selalu terbuka untuk penawaran atau pembatalan penawaran. Namun, peraturan pembatalan itu harus dikomunikasikan sebelum penerimaan dibuat. Contoh kasus *Byrne vs Vantiem Hoven* (1880). Dalam rangka menjadi ikatan hukum, suatu penawaran harus jelas dan tidak boleh salah. Sebagaimana keputusan terkenal dari peradilan dalam kasus *Harvey vs Faley* (1893).

Kedua, **Penerimaan**, prinsipnya bahwa penerima harus mengetahui penawaran pada waktu ia menandatangani penerimaan untuk perjanjian. Penerima tidak perlu menandatangani dengan kata ia dapat juga menandatangani dengan tingkah laku. Meskipun demikian, kepentingan harus mengambil tempat.

Jika yang menawarkan ingin menarik/membatalkan persyaratannya, ia harus mengerjakan sebelum waktu tersebut. Meskipun demikian, jika itu ditetapkan bahwa penerimaan harus dikomunikasikan dalam rangka untuk menjadi efektif, mengirimkan akan tidak efektif, mengirimkan akan tidak cukup untuk menyimpulkan kontrak tersebut.

Kedua penawaran dan penerimaan suatu kontrak hanya dapat dilengkapi jika semua persyaratan-persyaratan pokok telah disetujui sehingga segala-galanya harus diselesaikan dengan lengkap.

III.A.2. Tujuan Berkontrak (*the Intention to Contract*)

Banyak perjanjian-perjanjian berada di luar ruang lingkup kontrak karena mereka peduli kepada masalah-masalah moral dibandingkan hukum, kewajiban, atau sebab para pihak setuju bahwa mereka tidak dapat diterima sebagai kontrak yang dapat dilaksanakan atau sebab mereka tidak bertujuan demikian.

Suatu transaksi bisnis tidak akan diterima sebagai suatu tanggung jawab moral, seyogyanya dicatat bahwa tujuan yang telah diekspresikan itu dapat kadang-kadang mempunyai akibat menjadi suatu kontrak yang mengikat atas perjanjian yang mungkin oleh kebijaksanaan lain bukan dihormati sebagai kontrak.

III.A.3. Kapasitas

Ada 3 (tiga) tingkatan ketidakmampuan untuk membuat kontrak-kontrak:

1. Orang yang belum dewasa (*minor*).

Peraturan *Common Law* menegaskan bahwa kontrak anak-anak tidak mengikat secara hukum. Setiap orang di bawah usia 21 tahun yang membuat kontrak adalah tidak sah secara hukum. Tidak seorangpun seyogyanya diizinkan mensahkan suatu kontrak yang telah dibuat yang bersangkutan sebelum dewasa (*the Infants Relief Act 1874*).

Menurut Sub 1 *The Family Law Report Act 1969*, usia 18 sampai dengan 21 tahun sebagai mayoritas orang yang belum dewasa. Kedua peraturan perundang-undangan dan *common law* tersebut mengenai kapasitas dari orang yang belum dewasa tidak dapat diubah.

Ada 3 (tiga) pengecualian atas peraturan umum tersebut bahwa anak-anak yang belum dewasa tidak dapat diikat kontrak. Pertama, setiap kontrak anak-anak yang belum dewasa menerima *necessaries*, ia diikat untuk membayar suatu harga yang beralasan untuk mereka. Kedua, ada kepastian macam-macam kontrak magang dan jasa seperti kontrak untuk membayar sewa. Ketiga, kontrak dagang dan jasa di pengadilan menguntungkan kepada seorang anak yang belum dewasa.

Ada 2 (dua) cara yang mengatur keadilan yang kurang seimbang kebanyakan dari mereka yang membuat kontrak

dengan orang belum dewasa secara hukum. Di tempat pertama, pada satu sisi penampilan khusus tidak akan dijamin memperkarakan seorang anak yang belum dewasa secara hukum. Tempat kedua, pengadilan dapat kadang-kadang memaksa orang-orang yang belum dewasa secara hukum, sekurang-kurangnya ketika ia telah bertindak dengan bangga, untuk memperbaiki setiap keuntungan yang ia telah terima di bawah kontrak.

2. Koperasi (*Corporations???*)

Pada *common law* telah dihentikan untuk membuat kontrak untuk menghormati semua Koperasi berdasarkan *The Corporate bodies contract act* 1960. Agen Koperasi sekarang ini dapat membuat kontrak-kontrak atas nama mereka berkaitan dengan setiap masalah di dalam kekuatan Koperasi apapun dengan cara kontrak-kontrak yang sama yang telah dibuat diantara individu.

3. Orang gila dan mabuk.

Orang gila dan mabuk tidak sah secara hukum untuk membuat kontrak.

III.A.4. Formalitas

Tidak ada formalitas khusus yang diperlukan untuk menciptakan suatu kontrak. Pengecualiannya kontrak-kontrak harus dibuat dibawah materai, dengan Akta adalah:

1. Kontrak hanya sah secara hukum ketika dibuat dalam suatu bentuk Form khusus:
 - a. Pernyataan janji-janji yang betul-betul bukan kontrak menurut klasifikasi modern, mereka bukan perjanjian;
 - b. Kontrak yang dibuat atas badan hukum;
 - c. Semua properti atas tanah atau setiap kepentingan-kepentingan atas tanah (Subyek kepada Property Act 1925, Sub 52 (2);
 - d. Kebijakan-kebijaksanaan asuransi kelautan;
 - e. Bukti pembayaran/kwitansi;
 - f. Perjanjian-perjanjian kredit.
2. Kontrak yang diperlukan untuk dibuktikan dalam bentuk suatu form khusus: bukti-bukti dari kontrak-kontrak ini dalam suatu bentuk khusus efektif hanya bukti dari keberadaannya dan

kegagalan untuk menghasilkan bukti itu hanya mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan. Kontrak-kontrak untuk didiskusikan adalah:

- a. Janji-janji untuk menjawab hutang, wanprestasi atau kegagalan dari orang lain, meskipun demikian mereka hanya mengkover kontrak jaminan, tidak ada kompensasi;
- b. Kontrak-kontrak untuk penjualan atau disposisi lain dari tanah atau setiap kepentingan atas tanah.

Mengenai kontrak-kontrak tertulis, Piagam diperlukan bukti yang originil. Selanjutnya diperlukan menjadi satu dokumen yang meliputi semua kontrak. Ketika pernah menyatakan bahwa bukti yang diperlukan tidak disediakan, pengadilan akan mengatasi dengan 2 (dua) cara:

- 1.) Mereka akan membuat penafsiran setiap seksi kedalam fakta-fakta yang khusus atau diluar ruang lingkup dari kualitas kasus yang baik sebelum mereka perlukan;
- 2.) Doktrin dari sebagian penampilan ketika suatu pihak telah melaksanakan bagian dari perjanjiannya, pihak lain akan dipaksa untuk melaksanakan untuk mengijinkannya menghindari kewajibannya dengan dinyatakan Piagam dalam kasus tersebut.

Pertama, tindakan penampilan harus menunjukkan bahwa itu telah dilaksanakan berdasarkan kepercayaan atas kontrak dengan tergugat yang konsisten dengan pernyataan kontrak.

Kedua, tindakan harus dilaksanakan dapat tidak adil bagi si tergugat, mengambil keuntungan dan kekosongan tulisan.

∴ Ketiga, doktrin hanya dapat dilibatkan dalam hal dimana kontrak yang sedang ditulis itu suatu perbuatan hak yang adil dari tindakan khusus akan dapat disediakan.

Keempat, pernyataan kontrak, pemikiran *Ex Hypothese* itu tidak dapat dibuktikan dengan bukti tertulis, harus menjadi bukti properti dengan lisan atau bukti yang lain.

III.A.5. Pertimbangan (*consideration*)

Suatu kontrak yang akan dilaksanakan di bawah materai, kecuali penggugat dapat menunjukkan telah disediakan

pertimbangan. Pertimbangan atau *consideration* adalah salah satu elemen pokok, yang membedakan kontrak mengikat dapat melaksanakan janji-janji, kita harus mempertimbangkan sekarang beberapa dari peraturan mengenai hal tersebut. Pertimbangan dapat didefinisikan sebagai pertimbangan yang bernilai dalam hukum dapat berdiri dari hak yang sama, kepentingan, keuntungan/tambahan keuntungan kepada salah satu pihak atau beberapa kesabaran, kerusakan, kehilangan atau tanggung jawab yang sudah diberikan, penderitaan atau pelaksanaan oleh orang lain. Pertimbangan harus riil, ini ditunjukkan dalam contoh di bawah ini:

- a. Suatu janji untuk mengerjakan sesuatu yang jelas-jelas tidak mungkin adalah dengan jelas kurang bernilai;
- b. Suatu janji yang tidak jelas tidak akan melanjutkan pertimbangan.

III.A.6. Illegal

Mengerjakan sesuatu yang ilegal tidak dapat suatu tujuan atau objek dari kontrak. Contoh kontrak-kontrak yang ilegal pada *common law* adalah kontrak-kontrak untuk melakukan kriminal. Kontrak yang bertentangan dengan kebijaksanaan publik dan kontrak-kontrak yang bertentangan dengan peraturan moralitas.

Ilegal adalah suatu yang tidak jelas dan istilah tidak terdefinisi. Akibatnya bermacam-macam menurut sifat elemen yang bertentangan dengan hukum. Sesuatu yang sudah jelas-jelas salah bahwa pengadilan akan menolak melaksanakan kontrak, yang mempunyai hubungan yang tersembunyi dengan mereka.

Suatu contoh ekstrim dari suatu tindakan tingkah laku yang buruk yang ilegal adalah prostitusi. Akibat kontrak mengenai prostitusi adalah "*null and void*". Oleh karena itu bertentangan dengan hukum.

Contoh lain dari ilegal adalah kontrak yang bertentangan dengan kebijaksanaan publik. Istilah kebijaksanaan publik berarti semua prinsip *common law* dan keseimbangan yang telah dilibatkan berabad-abad yang lampau, peraturan dari kebijaksanaan publik untuk mereka telah diciptakan oleh hakim apa yang mereka pertimbangkan untuk menjadi kebaikan publik sehubungan kontrak yang bertentangan menunjukkan pembatasan yang pasti yang

pengadilan tempatkan atas hak untuk membuat kontrak-kontrak yang mereka percaya bertentangan dengan kepentingan publik. Satu dari sebagian besar kategori yang penting dari perjanjian adalah bahwa yang dipegang bertentangan dengan kepentingan publik adalah kontrak yang membatasi perdagangan atau *restrain trade*.

Adapun syarat berakhirnya suatu penawaran/Offer adalah:

- Atas kematian salah satu *Offeror* atau *offeree* sebelum penerimaan/*acceptance*.
- Dengan tidak diterimanya/*unacceptance* di dalam tengang waktu yang telah ditetapkan untuk penerimaan di dalam waktu yang beralasan.
- Dengan pembatalan sebelum penerimaan.
- Ketika ditolak oleh the *offeree*.

Masalah berakhirnya kontrak akibat kematian belum diatur di dalam hukum Perjanjian di Indonesia.

J. Upaya Dunia Internasional Mengenai Pengaturan E-Commerce

Adapun upaya dunia internasional tentang pembentukan dunia siber antara lain melalui¹²:

a. Model Law on E-Commerce dari UNCITRAL.

1. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan untuk memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.
2. Dalam hal hukum mengharuskan adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis dikatakan dalam pasal 6 *Model Law UNCITRAL* ini, "*Where the law requires information to be in writing, the requirement is met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be useable for subsequent reference*"
3. Dalam hal tanda tangan, maka suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah.
4. Dalam hal kekuatan pembuktian dari data yang bersangkutan, maka data *message* memiliki kekuatan pembuktian

¹² Mariam Darus Cs, *Op Cit*, hal 274

5. Suatu penawaran dan penerimaan tawaran tersebut (*offer and acceptance*) dapat dinyatakan dalam bentuk data *message* dan jika data tersebut digunakan sebagai **format dari kontrak** maka kontrak tersebut tidak dapat ditolak keabsahannya dan kekuatan hukumnya.
- b. *Electronic Transaction Act 25 of 1998* yang telah direvisi pada 1999, *European Union Directive on E-Commerce* 8 Juni 2000. Terdapat beberapa hal yang penting harus diperhatikan mengenai masalah kontrak:
 1. Setiap negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum mereka membolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik, kecuali dalam hal kontrak pengalihan hak real estate, kontrak yang diatur dalam hukum keluarga, kontrak penjaminan, dan kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.
 2. Setiap negara harus dapat memberikan pengaturan yang relevan atas kontrak yang berlangsung.
 3. Remedies dalam *cyber contract* ada 3:
 - a. *Expectation damages*
 - b. *Reliance damage*
 - c. *Specific damage*.

Bentuk-bentuk Transaksi kontrak *E-Commerce*.

Adapun bentuk- bentuk transaksi *e-commerce* yang berkembang mencakup:

- a. Suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi *e-mail*, dimana penawaran/*offering* dan penerimaan/*acceptance* dapat dipertukarkan.
- b. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui *website* dan jasa *on-line* lain.
- c. Bentuk lainnya mencakup *direct on-line* transfer dari informasi dan jasa. *Website* digunakan sebagai *medium of communication* dan sekaligus sebagai *medium of exchange*.
- d. Kontrak yang berisi *Electronic Data Interchange* (EDI).

- e. Suatu kontrak dalam internet yang bersifat perjanjian lisensi *Clickpwrap* dan *Shrinkp-wrap*. *Software* yang di-download dari internet lazimnya dijula dengan suatu lisensi *Click-wrap*.

Berangkat dari fenomena yang dinamis perkembangan pengaturan transaksi hukum kontrak *e-commerce* yang berasal dari AS yang menganut hukum *common law*/sistem *anglo-saxon* seperti halnya di negara Inggris tersebut diatas maupun dari hukum perjanjian di Indonesia / *civil law*/BW, yang merupakan produk hukum Belanda dimana di negara asalnya Belanda sendiri juga sudah melakukan reformasi hukum kontrak serta upaya-upaya hukum internasional di dala mengantisipasi semakin maraknya transaksi e -Commerce tanpa batas (*borderstateless*) dan *paperless* (dunia maya) dan pelanggaran hukum yang dilakukan para “hacker/cracker” yang “nakal”, maka sudah seyogya Indonesia segera mereform hukum perjanjian/kontrak yang diatur dalam Buku ke III BW khusus perihal pengaturan transaksi *e-commerce*.

Menurut Mochtar Kusumatmadja, hukum kontrak merupakan hukum yang tidak sensitif seperti halnya hukum waris/keluarga sehingga dapat saja di-reform sesuai dengan tuntutan globalisasi dan OTDA (*law as a tool of social engeneering*) seperti halnya hukum perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum dagang. Hal ini juga di-“amini” oleh Sunaryati Hartono di dalam sebuah makalahnya di dalam sebuah seminar hukum nasional di Bali, dimana perlu reformasi hukum kontrak/perjanjian dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan bebas yang seyogya sesuai dengan semangat landasan filosofi hukum bangsa ini, yaitu Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku, di dalam rangka terciptanya masyarakat adil dan makmur di Indonesia ini.

Malcolm Frank dalam *The Realities of Web-bases Elektronik Commerce* menyarankan tujuh langkah menuju sukses dalam melakukan transaksi bisnis *e-commerce*¹³:

¹³ Budi Agus Ruswandi, *Hukum dan Internet Di Indonesia*, Op Cit, hal 118

1. *E-commerce* harus dipandang sebagai sistem bisnis dan bukan sistem komputer. Artinya *e-commerce* harus merupakan solusi komperenshif dalam berbisnis sehingga yang diurusi bukan sisi teknisnya semata tapi pula strategi, proses, organisasi, dan manusianya.
2. Kemauan untuk terjun ke *e-commerce* harus didukung penuh oleh pimpinan tingkat atas. Bahasa lainnya, pimpinan atastlah penanggung jawab dan pemilik *e-commerce* ini.
3. Pembuatan proses bisnis harus terdefinisi secara eksak guna menghindari "pendewaan" teknologi dan komputer sebagai satu-satunya pembuat solusi.
4. Mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik yang diakibatkan peralihan ke *e-commerce*. Konflik seperti ini sangat mungkin datang dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan strategi baru ini.
5. Mengantisipasi kemungkinan gerakan anti perubahan (*resistance to change*) dari internal perusahaan.
6. Harus mempelajari demografi dan kebumhan konsumen dalam rangka menyajikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada mereka; dan;
7. Harus disiapkan tenaga-tenaga terampil bidang teknologi informasi yang mengerti *e-commerce* dengan segala persoalannya, termasuk internet, intranet, *Web*, *Database*, pengamanan sistem, masalah-masalah hukum yang terkait dan lain-lain.

Di samping ketujuh langkah strategis di atas, Untuk dapat mengoptimalkan transaksi *e-commerce* dalam meraup keuntungan, maka aspek hukum juga memegang peranan yang strategis sebagai jaminan bagi para pihak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa (*dispute*).

Disamping hal tersebut diatas juga perlu dipertimbangkan, perlu dibentuk hukum kontrak dagang internasional guna mengantisipasi lalu lintas perdagangan internasional lewat *e-commerce* berdasarkan hukum dari *anglo saxon/common law* tersebut di atas (*justification of law*) yang juga dilakukan oleh

Negeri Belanda, dimana Buku ke III BW tentang Hukum Perikatan/Perjanjian berasal di dalam rangka sebagai anggota dari negara Masyarakat Ekonomi Eropah. Dan Perlu segera diundangkan UU Informasi dan teknologi – Kerjasama Unpad dan ITB serta UU signature melalui digital, yang dibuat UI. Dan juga Perlu diperluas lingkup dan ruang berlakunya pelaku usaha di dalam pasal 1 butir 3 UU perlindungan Konsumen, yaitu termasuk pelaku usaha yang bergerak diluar wilayah hukum RI guna mengantisipasi perlindungan konsumen dalam bertransaksi lewat *e-commerce*.

K. Penutup.

Bahwa pengaturan transaksi bisnis *e-commerce* di dalam hukum perjanjian di Indonesia ditemukan dalam buku III bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata khususnya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian juncto Pasal 1338 (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak. Namun, belum ada harmonisasi hukum di dalam pengaturan transaksi bisnis *e-commerce* di dalam aspek hukum perjanjian di Indonesia. Oleh karena itu, seyogyanya perlu adanya harmonisasi hukum di dalam pengaturan transaksi bisnis *e-commerce* di dalam aspek hukum perjanjian di Indonesia khususnya di dalam mengantisipasi perdagangan bebas (WTO/AFTA dan APEC). Selain itu, seyogyanya aspek hukum perjanjian Indonesia khususnya yang mengatur transaksi bisnis *e-commerce* tersebut di-reform/disesuaikan (*law adjustification*), seperti halnya negara Belanda dengan sistem *civil law* sebagai salah satu negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) sesuai sistem *anglosaxon/Inggris* tuntutan masyarakat bisnis global dan OTDA, dimana pada umumnya transaksi bisnis modern sekarang ini didominasi hukum yang berasal dari sistem *anglosaxon/Inggris* sebagai suatu paradigma baru yang sedang berkembang dinamis, tetapi dengan pembatasan *reform/law adjustification* tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai filosofi hukum bangsa ini, yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dan RUU tentang pemanfaatan teknologi informasi dan RUU tentang Informasi Elektronik dan Transaksi

Elektronik segera disahkan DPR agar ada kepastian hukum dan jangan sampai berlarut-larut seperti “nasib” nya RUU tentang PMA guna merangsang iklim perdagang bebas dan investasi yang “sehat” bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU-BUKU

Badruzaman, Mariam Darus, *et. al. Kompilasi Hukum Perikatan-Dalam Rangka Memperngati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep HUKUM Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2002.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Padeld, G. dan DLA Barker. *Law Made Simple Books*, Heinemen Profesional Publishing. London: OXFORD. 1987.

Riswandi. Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2003.

Upp, Robert D. *Gilbert Law Summaries Business Law 2nd edition*. Chicago: Harcourt Brace Jovanovich Legal And Profesional Publications Inc. 1984.

Visu Sinnadurai dan T.N. Philip Koh. *The Law of Contract in Malaysia and Singapore*. Kualalumpur: Oxford. 1979.

B. Jurnal/Makalah

Alif, Rizal. “Bentuk Kontrak Menurut Hukum Inggris,” *Majalah Hukum Triksakti*, Fakultas Hukum Trisakti, April 1999.

Kantaatmadja, Mieke Komar. "Pengaturan Kontrak Untuk
Perdagangan Elektronik," *ELIPP II*, Cyberlaw, April 2002.